

ANALISIS KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PEMBINAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN SUMBAWA

Ade Sujastiawan¹, Tanti Ansima Sapitri^{2*}, Edrial³

¹²³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: tantiansisma1@gmail.com

Article Info

Article History

Received: 03 Desember 2025

Revised: 13 Desember 2025

Published: 31 Desember 2025

Keywords

Dana Desa;

Kinerja Pemerintah;

Pemerintahan Desa;

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa, di tengah paradoks pencapaian prestasi penyaluran terbaik se-NTB namun masih ditemukannya kasus penyalahgunaan dana di tingkat desa. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di DPMD dan tiga desa sampel (Desa Lebin, Tengah, dan Labuhan Mapin). Hasil penelitian menunjukkan kinerja DPMD secara umum baik dalam aspek kepatuhan regulasi dan konsistensi perencanaan. Namun, ditemukan kelemahan signifikan pada aspek intensitas pembinaan yang hanya dilakukan setahun sekali dan pendampingan teknis aplikasi Siskeudes yang terkendala infrastruktur digital. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan anggaran operasional dinas dan rendahnya literasi digital perangkat desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi metode pembinaan dari tatap muka sporadis menjadi pendampingan digital berkelanjutan (e-clinic) serta penguatan fungsi pengawasan preventif.

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi Dana Desa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam mendorong kemandirian dan kesejahteraan desa. Dana Desa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.

Di Kabupaten Sumbawa, pengelolaan Dana Desa menjadi perhatian penting mengingat perannya yang strategis dalam pembangunan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa memiliki tanggung jawab krusial dalam memastikan Dana Desa dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Peran DPMD meliputi pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa. Berbagai penelitian juga menegaskan pentingnya peran DPMD dalam memastikan realisasi penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen DPMD Kabupaten Sumbawa terlihat dari prestasinya meraih peringkat pertama kinerja penyaluran Dana Desa terbaik se-NTB tahun 2024. Selain itu, alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumbawa juga meningkat dari Rp 149,18 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp 150,77 miliar pada tahun 2025. Namun demikian, peningkatan alokasi dana ini menuntut adanya perencanaan dan pengawasan yang lebih matang guna memastikan pemanfaatannya berjalan optimal dan akuntabel.

Meski demikian, pengelolaan Dana Desa tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Beberapa desa di Kabupaten Sumbawa menghadapi sejumlah tantangan, sebagaimana terjadi di Desa Lebin, Kecamatan Ropang. Penelitian menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa di desa tersebut sudah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Kasus lain terjadi di Desa Tengah, Kecamatan Utan, pada tahun 2023, di mana ditemukan penyalahgunaan Dana Desa sebesar Rp 500 juta yang berujung pada pemberhentian kepala desa setempat. Kejadian tersebut menegaskan pentingnya peran DPMD dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mencegah terjadinya penyimpangan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara kinerja administratif di level kabupaten dengan akuntabilitas substantif di level desa. Prestasi sebagai penyalur Dana Desa tercepat belum tentu menjamin kualitas penggunaan dana yang bebas dari fraud. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi apakah pola pembinaan yang dilakukan DPMD selama ini sudah menyentuh akar permasalahan tata kelola desa, atau hanya sebatas pemenuhan syarat administratif penyaluran semata.

Selain pengawasan pemerintah, partisipasi masyarakat juga merupakan faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Studi di Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, mengindikasikan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan. Dalam hal ini, DPMD berperan mendorong keterlibatan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada pemerintah desa beserta warganya.

Peningkatan alokasi Dana Desa juga membawa tantangan tersendiri bagi DPMD. Instansi ini dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal. Tantangan tersebut mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia di tingkat desa, pengembangan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan berbasis teknologi informasi, serta penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi. Selain itu, sinergi antara DPMD dengan instansi terkait seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah kabupaten sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan akuntabel. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan-berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam konteks tersebut, evaluasi terhadap kinerja DPMD dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sumbawa menjadi sangat relevan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pembinaan, serta merumuskan strategi perbaikan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, Dana Desa dapat menjadi instrumen yang benar-benar mampu mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Sumbawa.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kinerja DPMD Kabupaten

Sumbawa dalam melakukan pembinaan pengelolaan Dana Desa, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut, serta menilai efektivitas pembinaan yang telah dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi peningkatan pengelolaan Dana Desa di masa mendatang, sehingga tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dapat tercapai secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa dalam melakukan pembinaan pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali persepsi, pengalaman, serta praktik pembinaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah dan pemerintah desa secara kontekstual.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa dengan lokasi penelitian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa serta beberapa desa yang menjadi locus penelitian. Desa-desa yang diteliti meliputi Desa Lebin, Desa Tengah, dan Desa Labuhan Mapin. Pemilihan desa-desa tersebut dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa-desa tersebut memiliki karakteristik pengelolaan Dana Desa yang berbeda, baik dari sisi besaran anggaran, tingkat kapasitas aparatur desa, maupun kompleksitas permasalahan pengelolaan Dana Desa. Dengan variasi karakteristik tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja DPMD dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang ditentukan secara purposive, yaitu Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa, pejabat struktural dan staf yang membidangi pembinaan pemerintahan desa, tenaga pendamping desa, kepala desa, serta perangkat desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi berupa laporan kinerja DPMD, laporan realisasi Dana Desa, pedoman teknis pengelolaan Dana Desa, peraturan perundang-undangan terkait, serta publikasi ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh data mengenai bentuk pembinaan, mekanisme pendampingan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan DPMD dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan kegiatan pembinaan di tingkat desa. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan

dengan cara menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian, yaitu kinerja DPMD dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses verifikasi secara berulang dengan cara membandingkan temuan antar sumber data dan antar teknik pengumpulan data, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data empiris.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pejabat DPMD, pendamping desa, dan aparatur desa. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keabsahan yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa menunjukkan dinamika yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor administratif, teknis, serta kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, kinerja tersebut dapat dilihat dari ketepatan waktu penyaluran Dana Desa, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas pembinaan kepada perangkat desa, efektivitas penggunaan dana sesuai perencanaan, tingkat partisipasi masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan desa.

Dalam aspek ketepatan waktu penyaluran Dana Desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran tahap awal umumnya berjalan sesuai jadwal. Namun, keterlambatan masih sering terjadi pada tahap berikutnya, terutama tahap kedua dan ketiga. Berdasarkan wawancara dengan Kepala DPMD Kabupaten Sumbawa, keterlambatan tersebut sangat dipengaruhi oleh kelengkapan administrasi dan kesiapan laporan dari pemerintah desa. Temuan ini diperkuat oleh keterangan perangkat desa di Desa Usar, Desa Moyo, dan Desa Moyo Mekar yang menyatakan bahwa keterlambatan penyusunan laporan realisasi anggaran sering disebabkan oleh keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta kendala teknis berupa jaringan internet yang tidak stabil.

Kendala teknis terkait penggunaan Siskeudes dan keterbatasan jaringan internet ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumbawa. Penelitian Ushwatin dan Rodiyah (2024) menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi hambatan serupa, khususnya terkait kualitas infrastruktur teknologi informasi dan kemampuan aparatur desa dalam beradaptasi dengan sistem digital. Temuan serupa juga disampaikan oleh Putri dan Nugroho (2021) yang menemukan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan desa di beberapa kabupaten dipengaruhi oleh gangguan akses sistem dan keterbatasan jaringan internet, terutama di wilayah perdesaan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa permasalahan keterlambatan akibat

Siskeudes bukan semata-mata kelemahan manajerial lokal, melainkan merupakan isu struktural yang bersifat nasional.

Dari sisi kepatuhan terhadap regulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMD Kabupaten Sumbawa telah menjalankan perannya sebagai pembina dengan menjadikan regulasi sebagai acuan utama dalam pengelolaan Dana Desa. Setiap kebijakan baru dari pemerintah pusat ditindaklanjuti melalui sosialisasi, petunjuk teknis, serta pendampingan kepada desa. Pemerintah desa pada umumnya juga mematuhi regulasi yang berlaku, meskipun tetap menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal melalui mekanisme musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi regulasi tidak dilakukan secara kaku, melainkan adaptif dan partisipatif, tanpa mengabaikan kerangka hukum yang telah ditetapkan.

Kualitas pembinaan yang dilakukan oleh DPMD dinilai cukup membantu dalam meningkatkan pemahaman perangkat desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa, penyusunan RKP Desa, serta penggunaan aplikasi Siskeudes. Namun demikian, pembinaan tersebut masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Perangkat desa menilai bahwa materi pembinaan sering kali bersifat teoritis dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung seperti perangkat komputer dan akses internet menyebabkan hasil pembinaan tidak dapat diterapkan secara optimal. Intensitas pembinaan yang relatif rendah, yang umumnya hanya dilakukan satu kali dalam setahun, juga menjadi faktor yang membatasi efektivitas pembinaan secara berkelanjutan. Frekuensi pembinaan yang hanya satu kali setahun sangat tidak memadai mengingat kompleksitas pengelolaan Dana Desa yang mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pembinaan DPMD lebih bersifat reaktif (menunggu masalah) daripada preventif. Seharusnya, DPMD menerapkan sistem early warning melalui monitoring berkala per kuartal.

Efektivitas penggunaan Dana Desa berdasarkan dokumen perencanaan menunjukkan hasil yang relatif baik. Program-program yang direncanakan dalam RKP Desa dan APBDes umumnya dapat direalisasikan sesuai dengan hasil musyawarah desa. Pembangunan infrastruktur, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan fasilitas umum menjadi prioritas yang konsisten dijalankan oleh pemerintah desa. Meskipun terdapat penyesuaian kegiatan akibat kondisi teknis di lapangan, perubahan tersebut dilakukan melalui mekanisme revisi yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa secara substantif Dana Desa telah dimanfaatkan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa juga menunjukkan perkembangan positif. Masyarakat semakin aktif terlibat dalam musyawarah desa, memberikan masukan terhadap prioritas program, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perangkat desa menyampaikan bahwa meskipun partisipasi masyarakat belum sepenuhnya merata, keterlibatan warga dalam mengawasi pembangunan fisik dan penggunaan Dana Desa semakin meningkat. Partisipasi ini berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong pemerintah desa untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan prinsip tata kelola yang baik melalui pencatatan transaksi secara tertib dan penyampaian laporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Informasi penggunaan dana disampaikan melalui musyawarah desa dan papan informasi publik, meskipun dalam praktiknya masih terjadi keterlambatan pelaporan akibat kendala teknis. Namun demikian, upaya untuk menjaga akuntabilitas tetap terlihat, baik melalui dokumentasi administrasi maupun keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja DPMD Kabupaten Sumbawa dalam pembinaan pengelolaan Dana Desa dapat dikategorikan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Permasalahan keterlambatan akibat Siskeudes dan jaringan internet menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pengelolaan Dana Desa tidak hanya bergantung pada komitmen kelembagaan, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas aparatur desa secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian di daerah lain yang menegaskan bahwa tantangan digitalisasi keuangan desa merupakan isu sistemik yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah. Ketergantungan pada aplikasi Siskeudes tanpa didukung infrastruktur internet yang stabil di desa (seperti di Desa Lebin dan Tengah) menciptakan bottleneck administrasi. Kinerja DPMD dalam aspek ini belum optimal karena belum mampu memfasilitasi solusi alternatif, misalnya mode offline yang efektif atau penyediaan pusat data kecamatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa dalam pengelolaan Dana Desa, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja DPMD berada pada kategori baik. Proses penyaluran Dana Desa telah berjalan sesuai ketentuan, meskipun pada beberapa tahap masih mengalami keterlambatan akibat kendala administratif dan teknis di tingkat desa. Kepatuhan terhadap regulasi telah diterapkan dengan baik oleh DPMD maupun pemerintah desa, yang selalu menjadikan aturan sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pembinaan yang diberikan DPMD membantu meningkatkan kapasitas perangkat desa, meskipun intensitas kegiatan dan dukungan sarana masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal. Penggunaan Dana Desa pada umumnya telah sesuai dengan dokumen perencanaan seperti RKP Desa dan APBDes serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan menunjukkan tren positif, mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa. Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan desa juga telah diupayakan secara maksimal melalui pencatatan transaksi yang tertib, penyampaian laporan, dan keterbukaan informasi publik. Meski terdapat hambatan seperti keterbatasan SDM dan kendala teknis aplikasi, pemerintah desa tetap berupaya menjaga akuntabilitas. Dengan demikian, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperbaiki sarana pendukung, serta memperkuat koordinasi antara DPMD, desa, dan masyarakat demi

terwujudnya tata kelola Dana Desa yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi, & Sukidin. (2019). *Metode penelitian kualitatif: Perspektif kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Bawono, I. R., Kinasih, A. D. M., & Rahayu, A. K. (2020). Factors affecting accountability of village fund management through implementation of the village financial system (Siskeudes). *Journal of Accounting and Investment*, 1(3), 471–491.
- Indu Maharani, N., & Widodo, H. (2024). Accountability of village fund management with the village financial system application. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(4).
- Kristanto, S. B. (2023). Fraud prevention in the village fund system: A case study in Marga Mulya Village, Tangerang. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(2).
- Lubis, G. D., Khanifah, L. N., Adelia, Y. Z., Putri, S. A., & Pratama, M. D. (2025). Efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Desa Padasuka, Kabupaten Serang. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis penggunaan Siskeudes dalam pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2). [J](#)
- Putri, R. A., & Nugroho, R. (2021). Implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 67–82.
- Ritonga, I. T., & Pratama, A. B. (2019). Determinan keterlambatan pelaporan keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(2), 101–115.